



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NOER ROCHMAWATI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN**
3. NHK : **162077**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.267.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m²/120 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/45 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/45 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 199 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m²/45 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
6. Tanah Seluas 1310 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m²/45 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 377.000.000
8. Tanah Seluas 189 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 439.933.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 E AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 304.933.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 294.250.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	45.630.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	832.649.225
F. HARTA LAINNYA	Rp.	15.947.000
Sub Total	Rp.	5.895.409.225
III. HUTANG	Rp.	815.753.516
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.079.655.709

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.